

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

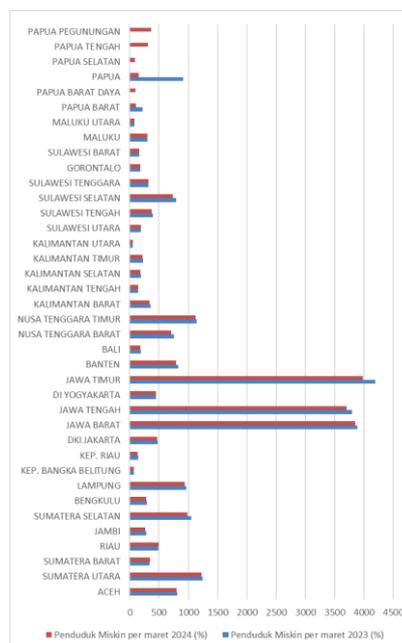
Salah satu tujuan mendasar pembangunan adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan dalam konteks ini bergantung pada kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Namun, tantangan besar yang dihadapi oleh banyak negara adalah ketidakmampuan masyarakatnya untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara maksimal. Tantangan ini berasal dari tingkat kemiskinan yang secara signifikan menghambat masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka (Prasojo & Fauziah, 2015, hlm.49-50).

Kemiskinan merupakan isu dalam pembangunan yang merangkum tantangan sosio-ekonomi rumit dan memerlukan perhatian besar. Hal ini lebih dari sekadar cerminan ketidakmampuan kelompok masyarakat tertentu untuk mencapai standar hidup yang layak, akan tetapi berkembang menjadi jaringan permasalahan yang mencakup dimensi ekonomi dan sosial (Prawoto, 2019, hlm.58). Dalam bidang pembangunan, kemiskinan dapat dianggap sebagai hambatan utama terhadap pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Fenomena ini menimbulkan kesenjangan dalam akses terhadap peluang ekonomi dan pendidikan, mendorong perpecahan sosial yang merugikan dan menghambat potensi pengembangan individu secara keseluruhan. Oleh karena itu, pendekatan terhadap kemiskinan sebagai isu pembangunan memerlukan strategi yang melibatkan kebijakan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan untuk mencapai pembangunan yang adil dan berkelanjutan (Murdiana & Mulyana, 2017, hlm.74).

Kemiskinan sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang membebani dunia. Meskipun era *Millennium Development Goals* (MDGs) telah berhasil menurunkan angka kemiskinan hampir setengahnya, upaya pengentasan kemiskinan belum dapat dikatakan tuntas (Ishartono & Santoso, 2016, hlm. 159). Oleh sebab itu, melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs), dunia kembali

mempertegas komitmennya untuk menghapus kemiskinan dalam segala bentuk hingga tahun 2030. *Sustainable Development Goals* merupakan hasil dari sidang PBB pada tahun 2015, dimana tujuan utamanya adalah mengentaskan kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. SDGs berisikan 17 tujuan dan 169 sasaran. Kemiskinan termasuk dalam *goals* pertama dalam tujuan SDGs, yaitu *No poverty* (Zulyanto, 2022, hlm. 32). Hal ini menandakan bahwa pengentasan kemiskinan tetap menjadi prioritas utama pembangunan global hingga tahun 2030.

Di Indonesia sendiri, masalah kemiskinan masih menjadi isu yang kompleks. Indonesia sebagai bagian dari komunitas global juga berkomitmen penuh terhadap pencapaian target SDGs, melalui berbagai kebijakan seperti dikeluarkannya Inpres Desa Tertinggal tahun 1995, pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2010, program dana desa, serta inisiatif lainnya dalam pemberdayaan masyarakat (Ishartono & Santoso, 2016, hlm. 159).



**Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi tahun 2023 dan tahun 2024**

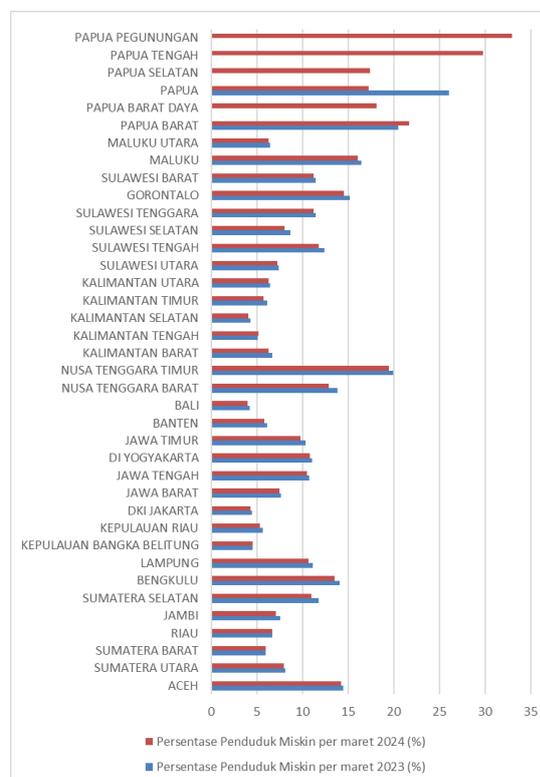
Sumber : BPS Indonesia (2025)

Ulfhi Yani, 2025

**PENGARUH BELANJA BANTUAN SOSIAL TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA BARAT (STUDI DI 27 KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014-2023)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan Gambar 1.1 kemiskinan di Indonesia selama 2 tahun terakhir mengalami sedikit penurunan angka kemiskinan di sebagian besar provinsi dari tahun 2023 ke tahun 2024. Penurunan ini tampak di sebagian besar provinsi, meskipun besarnya penurunan bervariasi antar wilayah. Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat mengalami penurunan dalam jumlah penduduk miskin, meskipun secara jumlah tetap tinggi karena total penduduk di provinsi tersebut juga tinggi. Penurunan juga terlihat di Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan. Provinsi-provinsi di wilayah timur seperti Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Maluku menunjukkan jumlah penduduk miskin yang relatif lebih sedikit dikarenakan total penduduknya pun lebih rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain.



**Gambar 1. 2 Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi tahun 2023 dan tahun 2024**

Sumber : BPS Indonesia (2025)

Ulfhi Yani, 2025

**PENGARUH BELANJA BANTUAN SOSIAL TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA BARAT (STUDI DI 27 KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014-2023)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan Gambar 1.2 secara nasional, ada kecenderungan penurunan persentase penduduk miskin di sebagian besar provinsi dari tahun 2023 ke tahun 2024. Namun, beberapa provinsi mengalami peningkatan atau stagnasi dalam tingkat kemiskinan. Papua Pegunungan dan Papua Tengah mencatatkan persentase penduduk miskin tertinggi mencapai lebih dari 30%. Nusa Tenggara Timur (NTT) juga tetap memiliki tingkat kemiskinan tinggi mendekati 20%. Provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah adalah DKI Jakarta, Bali, Kepulauan Bangka Belitung mencatatkan persentase penduduk miskin di bawah 5%. Hal ini sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan akses yang lebih luas terhadap layanan dasar. Provinsi-provinsi lain juga mengalami penurunan meskipun menunjukkan penurunan tipis dalam persentase kemiskinan.

Dari Gambar 1.1 terlihat bahwa Jawa Barat memiliki angka absolut penduduk miskin yang sangat tinggi, bahkan diantara yang tertinggi secara nasional bersanding dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Meskipun persentase penduduk miskin nya sekitar 7%, karena jumlah total penduduk Jawa Barat sangat besar lebih dari 48 juta jiwa, jumlah penduduk miskin tetap sangat besar. Artinya, dampak sosial dan ekonomi dari kemiskinan di Jawa Barat lebih luas dibandingkan provinsi kecil dengan tingkat kemiskinan tinggi tapi penduduk sedikit. Dalam Gambar 1.2 terlihat bahwa penurunan kemiskinan di Jawa Barat hanya 0,16%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pertumbuhan ekonomi, masalah struktural kemiskinan belum sepenuhnya teratasi. Kemiskinan di Jawa Barat tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga oleh faktor struktural seperti kesenjangan antarwilayah, keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar, serta disparitas pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat menjadi sebuah perhatian serius dalam konteks pembangunan. Meskipun Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan capaian perekonomian yang cukup progresif, kenyataannya, masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Fenomena ini

menciptakan tantangan kompleks yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat setempat.

Determinan pengentasan kemiskinan menurut Teori Keynesian bertumpu pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh wilayah terkait (Prasetyo & Thomas, 2021, hlm. 2743). Teori ini juga erat dengan peran pemerintah dalam menggerakkan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan secara keseluruhan meningkatkan kesejahteraan. Maka, disamping pertumbuhan ekonomi yang sebagian besar digerakkan oleh pasar, peran pemerintah dari segi pengeluaran juga penting dalam mengatasi kemiskinan. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi menjadi satu ukuran besar yang *deliver* unsur atau variabel yang dapat mereduksi kemiskinan, termasuk dalam hal ini pengeluaran (belanja) pemerintah. Sen (1981) menyatakan bahwa kemiskinan bisa diatasi dengan menegakkan hak-hak dasar kaum miskin. Kondisi miskin di Indonesia terjadi karena pemerintah gagal memenuhi hak-hak dasar masyarakat (Syawaluddin, 2015, hlm. 5). Teori ini mengindikasikan bahwa peran pemerintah dalam perekonomian bisa mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan melalui tiga jalur. Pertama, jenis pengeluaran tertentu dari pemerintah dapat mengurangi hambatan dan meningkatkan kualitas hidup rumah tangga berpendapatan rendah. Kedua, penciptaan lapangan kerja melalui proyek pekerjaan umum dapat menurunkan pengangguran serta mengurangi ketimpangan dan kemiskinan. Ketiga, efek berganda dari program penciptaan lapangan kerja dapat mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan berbagai investasi ulang (Stack, 1978, hlm.882-883).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan pengurangan angka kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Salah satu instrumen utama yang digunakan adalah alokasi belanja bantuan sosial, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok miskin dan rentan, serta memperkuat ketahanan ekonomi keluarga melalui perlindungan sosial. Belanja bantuan sosial merupakan bentuk pengeluaran pemerintah yang diarahkan secara langsung kepada masyarakat untuk menanggulangi risiko sosial dan mendorong inklusi sosial. Program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non

Ulfhi Yani, 2025

**PENGARUH BELANJA BANTUAN SOSIAL TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA BARAT  
(STUDI DI 27 KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014-2023)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Tunai (BPNT), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan contoh implementasi dari bantuan sosial yang diharapkan mampu menekan angka kemiskinan secara signifikan.

Dalam kerangka ekonomi publik, pemerintah memiliki tiga fungsi utama, yaitu alokasi, stabilisasi, dan distribusi. Fungsi distribusi atau redistribusi menjadi sangat penting dalam konteks ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Salah satu tokoh utama yang menjelaskan secara sistematis mengenai fungsi ini adalah Richard A. Musgrave. Melalui teori redistribusi pendapatan, Musgrave menekankan bahwa pemerintah perlu melakukan intervensi guna menciptakan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Redistribusi dilakukan dengan mentransfer sumber daya dari kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi ke kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dengan tujuan untuk memperkecil jurang ketimpangan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin (Musgrave & Musgrave, 1989).

Dalam praktiknya, fungsi distribusi dijalankan melalui berbagai instrumen pengeluaran yang ditujukan untuk kelompok rentan dan berpendapatan rendah. Pendekatan ini secara teoritis diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan dengan memberikan akses terhadap kebutuhan dasar dan memperkuat daya beli mereka. Selain itu, redistribusi pendapatan juga dapat menciptakan stabilitas sosial dan mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif. Dengan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin, kebijakan ini tidak hanya mengurangi ketimpangan, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia.

Secara teoritis, pemilihan variabel belanja bantuan sosial dalam penelitian ini didasarkan pada teori redistribusi pendapatan dari Richard A. Musgrave, yang menyatakan bahwa dua mekanisme utama redistribusi pendapatan adalah pajak progresif dari kelompok berpendapatan tinggi dan *transfer* pembayaran seperti bantuan sosial kepada kelompok rentan ekonomi.

Pajak progresif tidak digunakan dalam penelitian ini dikarenakan penelitian ini

Ulfhi Yani, 2025

**PENGARUH BELANJA BANTUAN SOSIAL TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA BARAT  
(STUDI DI 27 KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014-2023)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

memfokuskan penelitian di tingkat daerah, sedangkan pajak progresif dikelola oleh pemerintahan pusat. Dengan demikian, variabel belanja bantuan sosial sangat relevan untuk dianalisis dalam konteks pengaruhnya terhadap penurunan kemiskinan.

Selain relevansi teoritis, pemilihan variabel ini juga diperkuat oleh bukti empiris. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik tahun 2025 mengenai kondisi kemiskinan, disebutkan bahwa salah satu faktor utama yang memengaruhi penurunan tingkat kemiskinan pada tahun 2024 adalah penyaluran berbagai program bantuan sosial seperti Bantuan Pangan Beras, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP) (Badan Pusat Statistik, 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial memiliki peran nyata dalam memperbaiki kondisi ekonomi rumah tangga miskin di Jawa Barat, sehingga layak dijadikan variabel utama dalam kajian terhadap kemiskinan.

Karakteristik wilayah Jawa Barat yang terdiri dari 27 kabupaten/kota dengan kondisi sosial ekonomi yang sangat beragam memberikan dinamika tersendiri dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Ketimpangan pembangunan antarwilayah, perbedaan kapasitas fiskal daerah, dan keragaman kebutuhan lokal menjadi tantangan dalam efektivitas implementasi bantuan sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana belanja bantuan sosial yang dialokasikan oleh pemerintah mampu menekan angka kemiskinan di seluruh wilayah administratif Provinsi Jawa Barat.

Sejak tahun 2014, kebijakan perlindungan sosial di Indonesia mengalami transformasi besar, terutama dengan diluncurkannya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diintegrasikan dalam sistem BPJS Kesehatan. JKN menjadi bagian penting dari perluasan perlindungan sosial nasional yang bertujuan untuk menjamin akses layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok miskin. Peluncuran JKN menandai era baru dalam kebijakan kesejahteraan sosial di Indonesia, di mana belanja bantuan sosial mulai difokuskan pada peningkatan efektivitas dan perluasan cakupan (Oldistra & Sari, 2020, hlm. 10).

Ulfhi Yani, 2025

**PENGARUH BELANJA BANTUAN SOSIAL TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA BARAT  
(STUDI DI 27 KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014-2023)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019, pemerintah menetapkan target *Universal Health Coverage* (UHC) melalui penguatan sistem JKN dan integrasi program bantuan sosial lainnya. Sejak tahun 2015, anggaran untuk sektor kesehatan dan perlindungan sosial terus mengalami peningkatan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah juga menerapkan kebijakan afirmatif seperti penarikan di muka iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN, dan penyempurnaan data terpadu kesejahteraan sosial untuk meningkatkan ketepatan sasaran program.

Pemilihan rentang waktu penelitian tahun 2014–2023 bukan tanpa alasan. Tahun 2014 menjadi titik awal dari perluasan dan integrasi sistem perlindungan sosial secara nasional. Selain itu, rentang waktu ini mencakup tiga periode penting, yaitu sebelum pandemi Covid-19, masa krisis akibat pandemi, serta masa pemulihan pascapandemi. Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak 2020 telah memberikan tekanan besar terhadap ekonomi rumah tangga, terutama masyarakat miskin dan rentan. Untuk merespons hal ini, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja bantuan sosial dalam jumlah yang jauh lebih besar, seperti melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, dan Kartu Prakerja. Maka dari itu, rentang 2014–2023 dipandang representatif untuk menangkap dinamika pengaruh belanja bantuan sosial terhadap kemiskinan dalam berbagai kondisi ekonomi, baik stabil, krisis, maupun pemulihan.

Beberapa penelitian menunjukkan adanya pengaruh dari belanja subsidi dan belanja bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan. Popova (2023, hlm. 708), menemukan bahwa pemerataan belanja sosial signifikan menurunkan kemiskinan dan ketimpangan. Temuan lain diantaranya yakni Parekh & Oriana (2020, hlm. 8) juga menunjukkan bahwa tanpa bantuan sosial, negara-negara yang mengalami kontraksi GDP terparah akan mengalami lonjakan kemiskinan yang signifikan. Dewi & Andrianus (2021, hlm. 81) menunjukkan hasil bahwa pengeluaran pemerintah yaitu program bantuan langsung tunai berpengaruh terhadap kemiskinan. Rarun, dkk. (2018) pun menunjukkan hasil bahwa belanja bantuan sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Pausan,

Ulfhi Yani, 2025

**PENGARUH BELANJA BANTUAN SOSIAL TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA BARAT  
(STUDI DI 27 KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014-2023)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dkk (2024, hlm. 178) menemukan bahwa belanja bantuan sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Penelitian yang dilakukan Fadhi & Laila (2023, hlm. 201) menunjukkan hasil bahwa bantuan sosial BNPT memiliki pengaruh negatif terhadap penanggulangan kemiskinan dan bantuan sosial PKH memiliki pengaruh positif terhadap penanggulangan kemiskinan. Secara simultan BNPT dan PKH secara Bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan.

Namun, penelitian penelitian Alamanda (2020, hlm. 9) pun menunjukkan hasil bahwa belanja bantuan sosial, subsidi dan hibah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Indonesia. Selain itu, Balvociute (2020, hlm. 476) menunjukkan bahwa program bantuan sosial berhasil menurunkan jumlah orang miskin, tetapi tidak cukup kuat untuk mengatasi kemiskinan yang lebih dalam. Selain itu, Melati dkk. (2021, hlm. 428) menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Berdasarkan paparan di atas melalui fenomena gap, *theorycal* gap dan *research* gap yang ditemukan, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana faktor-faktor yang dijelaskan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Barat. Sehingga, peneliti mengangkat judul “Pengaruh Belanja Subsidi dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat (Studi Di 27 Kabupaten/Kota Tahun 2014-2023)”.

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran umum tingkat kemiskinan dan belanja bantuan sosial di Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana pengaruh belanja bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji teori keynesian dan teori musgrave tentang bagaimana pengeluaran pemerintah khususnya belanja bantuan sosial dapat mempengaruhi kemiskinan.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- 1) Manfaat Teoretis
  - a. Dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Ekonomi.
  - b. Sebagai referensi yang dapat dipakai untuk mengembangkan penelitian sejenis.
- 2) Manfaat Praktis

- a. Bagi pemangku kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemangku kebijakan dalam segi pembangunan serta pengembangan wilayah terkait.

- b. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mengoreksi, mengembangkan, serta menguatkan penelitian dengan topik berkenaan.

### 1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Sistematika penulisan karya tulis ilmiah ini merujuk pada pedoman karya tulis ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2019.

#### BAB I: Pendahuluan

Bagian pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, membuat rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, serta manfaat dari penelitian tersebut.

#### BAB II: Kajian Pustaka, Kerangka Teoritis dan Hipotesis

Bagian bab ini menguraikan mengenai teori-teori serta konsep dari permasalahan yang sedang diteliti dan hipotesis penelitian.

#### BAB III: Metode Penelitian

Ulfhi Yani, 2025

*PENGARUH BELANJA BANTUAN SOSIAL TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA BARAT  
(STUDI DI 27 KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014-2023)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Bagian bab ini merupakan bagian yang bersifat prosedural penelitian yang mencakup alur penelitian dari mulai menentukan objek dan subjek penelitian, metode penelitian, penentuan kriteria pemilihan hasil riset relevan, sumber perolehan hasil riset relevan dan format analisis.

#### BAB IV: Temuan dan Pembahasan

Bab ini mengemukakan tentang hasil penelitian yang dicapai melalui kajian penelitian yang relevan dan pembahasannya dalam rangka menjawab pertanyaan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

#### BAB V: Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi

Bagian bab ini berisi simpulan, implikasi dan rekomendasi yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut.